

ABSTRAK

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam realita yang ada sering kali terdapat masalah kesenjangan dalam pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu dengan warga mampu.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Daerah Kabupaten Lombok Timur. (2) Bagaimana implementasi regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Daerah Kabupaten Lombok Timur. (3) Bagaimana hambatan dalam implementasi regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Daerah Kabupaten Lombok Timur. Tujuan penelitian ini agar mengetahui bentuk, implementasi, dan hambatan dalam regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah (a) Wawancara Petugas Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Lombok Timur dan warga miskin pengguna layanan jamkesda. (b) Studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah mengenai hukum kesehatan. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan tahapan telaah data, reduksi data, penyusunan satuan, keabsahan data dan kesimpulan dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin di wilayah Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2014 dan Peraturan. Implementasi dari regulasi tersebut diwujudkan dalam program jaminan kesehatan masyarakat Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang dirasakan oleh masyarakat miskin sangat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi dirinya. Hambatan yang dialami oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan maupun warga miskin secara umum mengenai proses administrasi yang dianggap cukup rumit.

Saran penulis seharusnya adanya pembaharuan peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur secara khusus sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Perlu adanya sosialisasi secara intensif terkait proses-proses administrasi penggunaan layanan jamkesda mengingat sumber daya manusia kaum miskin masih rendah.

Kata Kunci : Jaminan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lotim